

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah manajemen mutu dalam pendidikan masih tergolong baru dibandingkan dengan manajemen mutu dalam bidang ekonomi industri. Edwar Sallis mengatakan bahwa gerakan untuk menerapkan manajemen mutu dalam bidang pendidikan dimulai sejak tahun 1980-an di Amerika Serikat terbatas hanya dalam *colleges* dan pada tahun 1990-an beberapa sekolah formal Amerika Serikat mulai menyadari pentingnya manajemen mutu. Pasca tahun 1990-an gerakan manajemen mutu mulai bergerak ke Eropa untuk mengkaji kesenjangan antara kebutuhan industri dengan hasil-hasil pengajaran di sekolah-sekolah.¹ Globalisasi menjadikan teori manajemen mutu kemudian menjadi kebutuhan dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan hingga era persaingan jaminan mutu. Masyarakat, pemerintah, dan pengguna jasa pendidikan sangat membutuhkan lembaga pendidikan yang bermutu. Hal ini harus direspon oleh setiap lembaga pendidikan sekolah dan madrasah. Sebuah lembaga pendidikan yang tidak mampu bersaing dengan baik akan mengalami kemunduran dan ketertinggalan dari lembaga pendidikan yang lain.

Masalah mutu pendidikan kini sedang menjadi isu nasional, yang urgensinya tidak bisa diabaikan. Banyak aspek yang berkontribusi terhadap

¹ Deden Maqbullah, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam: Model Pengembang Teori dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1-2.

mutu pendidikan, namun studi tentang manajemen mutu di lingkungan sekolah masih jarang dilakukan, karena umumnya masih beranggapan bahwa pelaksana di lapangan tinggal melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang ada.

Telah banyak gagasan terlontar dari para pakar maupun birokrat untuk memperbaiki manajemen mutu sekolah dan mutu hasil pendidikannya, bahkan pada saatnya telah pula melahirkan berbagai kebijakan baru. Namun ketika dihadapkan pada realita di lapangan, ternyata upaya menempuh kebijakan baru tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Setiap alternatif yang dilontarkan mengandung konsekuensi dan resiko yang bervariasi, malahan sering pula menimbulkan tantangan-tantangan baru.

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia.²

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, sertifikasi guru, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun nampaknya segala usaha

² Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Umaedi, *Managemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Departemen Pendidikan Pertama, 2001), h. 3.

tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masyarakat masih membicarakan lulusan sekolah belum bermutu, malah dari segi moral tampaknya kian merosot. Kejujuran sangat kurang, sopan santun tidak ada, kurang disiplin, kurang bertanggungjawab, rasa malu sangat kurang, penyelewengan di mana-mana, sampai negara kita menjadi negara nomor tiga terkorup di dunia. Ini semua adalah produk dan outcome yang diperoleh selama bersekolah.³ Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menyempurnakan sistem pendidikan. Upaya tersebut antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) bab II pasal 3 disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia*, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Pengembangan, peningkatan, dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara holistik dan simultan, tidak boleh parsial walaupun mungkin dilakukan bertahap. Perbaikan sektor kurikulum, tenaga guru, dan fasilitas serta sarana pembelajaran, tidak akan membawa perubahan signifikan jika tidak disertai dengan perbaikan pola dan kultur manajemen yang mendukung perubahan tersebut. Dinamika guru dalam pengembangan program

³ H. Buhari Alma, dkk, *Guru Profesional Menguasai, Metode dan Trampil Mengajar* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 124.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: BP. Panca Usaha, 2004) h. 3.

pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan proses dan hasil belajar siswa, jika manajemen sekolahnya tidak memberi peluang tumbuh dan berkembangnya kreativitas guru tersebut. Demikian pula penambahan dan penguatan sumber belajar berupa perpustakaan dan laboratorium tidak terlalu bermakna jika manajemen sekolahnya tidak memberi perhatian serius dalam optimalisasi pemanfaatan sumber belajar tersebut dalam proses belajar siswa. Manajemen memang merupakan sesuatu yang amat bermakna dalam perubahan menuju sebuah perbaikan.⁵

Peningkatan mutu pendidikan tampak mulai nyata walaupun belum dapat mengungguli negara-negara lain yang telah maju. Lahirnya berbagai Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang memberi penekanan akan pentingnya pendidikan, demikian seterusnya memasuki masa reformasi sampai sekarang, pemerintah telah berupaya keras memberikan perhatian spesifik terhadap dunia pendidikan sebagai indikator adanya landasan teoretis meningkatnya mutu pendidikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan, antara lain dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.⁶

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan mutu sebuah lembaga pendidikan sangat dipengaruhi

⁵ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 219.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah, mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan dunia pendidikan di daerahnya masing-masing, kabupaten dan kota di seluruh propinsi Indonesia*. Lihat Pemerintah Republik Indonesia, *UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000), h. 7.

bagaimana pelaksanaan manajemen mutu di sekolah tersebut. Namun demikian yang paling berperan dalam pelaksanaan manajemen mutu di suatu lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh kepala sekolah merupakan faktor yang memengaruhi kepemimpinannya. Disamping itu pendelegasian tanggungjawab supervisi kepadanya; kesadarannya terhadap fungsinya sebagai pemimpin pendidikan serta waktu yang dapat dipakai oleh kepala sekolah untuk menjalankan fungsi supervisi adalah merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kesempatan kepala sekolah untuk mengembangkan kepemimpinannya.⁷

Selain kepala sekolah, komponen yang mempunyai peran penting di sebuah lembaga pendidikan adalah guru. Guru mempunyai peranan utama dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu di sebuah lembaga pendidikan harus memiliki guru-guru yang profesional sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Pada Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 dinyatakan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional⁸ dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁹

Berdasarkan hal tersebut guru memiliki fungsi, peran dan kedudukan yang harus diemban, sementara mereka dibatasi oleh tingkat kemampuan,

⁷ Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan* (Malang: Bina Aksara, 1982), h. 25.

⁸ *Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.* Lihat redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Guru dan Dosen* (UU RI No. 14 th. 2005) (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.

⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Guru dan Dosen* (UU RI No. 14 th. 2005), h. 3.

sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik tugas disebabkan kurangnya kompetensi yang mereka miliki. Agar pengembang mutu guru lebih bermakna, maka pengembang tersebut harus menyentuh keutuhan tugas pokok dan fungsi guru. Aspek-aspek yang harus dikembangkan tersebut antara lain: penguasaan kurikulum, penguasaan materi, penguasaan metode mengajar, penguasaan teknologi pembelajaran, penguasaan penilaian hasil belajar, serta kemampuan melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau wali kelas.

Faktor penentu keberhasilan program pendidikan adalah adanya sumber daya guru yang berkualitas. Sumber daya guru merupakan potensi pokok yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan kebutuhan instansi pendidikan, karena itu peningkatan mutu sekolah mempersyaratkan adanya guru yang profesional. Secara umum, ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup; mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan; melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan peserta didik. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu sebagai bagian dari profesionalisme guru.¹⁰ Sebagai pengajar, guru dituntut mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga

¹⁰ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional* (Cet. II; Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), h. 3.

pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru sebaiknya memiliki kemampuan profesional dalam bidang pembelajaran.¹¹

Guru sebagai pendidik mempunyai posisi strategis, ia mempunyai pengaruh terhadap proses belajar mengajar peserta didik dan kualitas hasil belajar akan sangat ditentukan oleh kualitas pertemuan antara peserta didik dan guru. Setiap guru harus kreatif dan inovatif di dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Tidak berlebihan kiranya, kalau dikatakan bahwa suatu sekolah sangat ditentukan oleh peranan guru di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Seorang pendidik harus ahli dalam bidangnya, hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. al-Isra"/17:36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.¹²

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan supaya kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang tidak sejalan dengannya dan tidak mengikuti apa-apa yang kita tidak ketahui, tidak mengucapkan apa yang kita tidak ketahui, tidak mengaku tau apa yang kita tidak tau atau mendengar apa yang kita tidak dengar.¹³ Dari sinilah dapat dipahami bahwa seorang guru harus mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan profesinya sebagai guru, dia harus mengetahui bagaimana cara mengajar atau mendidik dengan baik, agar dalam

¹¹Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, h. 4.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (CV. Kathoda, 2005), h. 286.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 7; Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 472.

menyampaikan materi pembelajaran tidak mengada-ada dan seorang guru harus profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Hal ini juga dipertegas dengan Hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ
فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran”. (HR. Bukhāri)¹⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa segala sesuatu urusan atau pekerjaan yang dikerjakan tanpa keahlian di dalamnya akan menyebabkan kehancuran, termasuk di dalamnya pekerjaan seorang guru, guru harus betul-betul memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya, guru diharapkan memiliki beberapa kompetensi yang berhubungan dengan profesinya sebagai seorang guru, terutama guru harus memiliki kompetensi pedagogik.

Setiap usaha peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru akan memberi hasil dengan baik jika diikuti oleh kompetensi dan motivasi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Asrorun Ni'am mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kompetensi guru harus mendasarkan pada kemauan dan kemampuan guru. Artinya, guru tidak harus didikte dan diberi berbagai arahan dan instruksi. Oleh karena itu, perlu disusun standar profesional guru yang akan dijadikan acuan pengembangan

¹⁴ Al-Imam Abi Abdilah Muhammad Ibn „Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Ahmad, ahlih al-Bukhari (Juz 1; Jakarta: Darul al-Fikr, 1981), h. 21.

mutu guru.¹⁵ Glickman dalam Bafadal menyebutkan aspek pada guru yang menentukan orientasi profesionalnya, yaitu komitmen guru, aspek tersebut harus melekat pada diri seorang guru, karena ia akan menentukan tipe guru tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran.¹⁶ Hal lain diungkapkan oleh Asrorun Ni'am, bahwa yang mengakibatkan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yakni kelemahan yang terdapat pada diri guru itu sendiri, di antaranya rendahnya kemampuan untuk bekerja secara profesional.¹⁷

Kompetensi guru boleh dikata jauh dari harapan karena masih banyak guruguru yang mengajar bidang studi yang bukan merupakan spesialisasi keilmuannya, bahkan banyak juga guru yang latar belakang pendidikannya non keguruan. Sehingga pembinaan tenaga guru diharapkan pada tingkat profesionalitas guru, baik substansi ilmu dalam mata pelajaran yang dipegang ataupun kemampuan dan penguasaan metodologi. Hal ini merupakan persoalan pendidikan secara nasional yang masih dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu sampai saat ini. Realitas tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan.

Kompetensi guru pada umumnya cukup kompleks, sehingga baik dalam pendidikan prajabatan maupun selama berada dalam pekerjaannya dituntut sejumlah pengetahuan dan seperangkat keterampilan tentang jabatannya. Guru dituntut untuk melaksanakan berbagai tugas edukatif dan

¹⁵ . Ibrahim Bafadal & A. Imron, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Cet. I; Malang: Kerjasama FIP UM dan Ditjen-Dikdasmen. 2004), h. 51

¹⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalitas Guru Analisis Kronologis atas Lahirnya UU Guru dan Dosen* (Cet. I; Jakarta: Elsas, 2006), h. 42.

¹⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalitas Guru Analisis* h. 43.

tugas administratif. Setiap guru memiliki kelebihan dan keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini ditentukan oleh latar belakang pengetahuan, keterampilan dan motivasinya. Kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya dapat ditingkatkan melalui kompetensi dan supervisi secara teratur dan terencana.¹⁸

Kompetensi atau kemampuan terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, juga mengajarkan perilaku dan sikap.¹⁹ Kompetensi juga merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggung jawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.²⁰

Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, hal ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang berperan sebagai alat pendidikan dan kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan fungsi guru dalam memerhatikan perilaku peserta didik dalam belajar.²¹

¹⁸ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen, Kelembagaan Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Cet. II; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 17.

¹⁹ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 97.

²⁰ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, h. 98.

²¹ Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-etika* (Cet. VIII; Yogyakarta: Geraha Guru, 2012), h. 29

Upaya pengembangan profesi guru sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembaharuan LPTK yang mengarahkan pendidikan calon guru untuk penguasaan kompetensi tertentu, pembaharuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang kemudian diikuti dengan penerbitan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang salah satu isinya adalah tentang standar tenaga kependidikan, sampai perkembangan terakhir dengan diterbitkannya UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, yang menjadi dasar pijakan utama pengembangan profesionalisasi guru.²²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa manajemen mutu di sebuah lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kompetensi berbagai komponen yang ada di dalamnya, termasuk peningkatan kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik sangatlah penting dalam meningkatkan mutu sebuah lembaga pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pembatasan masalah dititik beratkan pada :

1. Kurangnya implementasi manajemen mutu di lingkungan sekolah.
2. Cara mengajar guru atau pedagogik guru yang kurang efektif dan kurang di perhatian oleh pihak sekolah.
3. Kurangnya perhatian dalam implementasi manajemen mutu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru oleh pihak lembaga sekolah.

²² H.M. Sulthon Masyhud, Manajemen Profesi Kependidikan (Cet. I; Jember; Kurnia Kalam Semesta, 2014), h. 2-3.

4. Masih jarang dilakukannya studi tentang manajemen mutu di lingkungan sekolah, karena pada umumnya pihak sekolah masih beranggapan bahwa implementasi di lapangan tinggal melaksanakan tugas nya saja sesuai pedoman yang ada.

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan-batasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat mengenai sasaran dan tidak mengambang dalam segi pemahaman. Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yakni implementasi manajemen mutu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MTs Mathlaul Anwar Bojong.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi manajemen mutu di MTs Mathlaul Anwar Bojong?
2. Bagaimana Kompetensi Pedagogik guru di MTs Mathlaul Anwar Bojong?
3. Bagaimana Implementasi Manajemen Mutu dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di MTs Mathlaul Anwar Bojong.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan serta melalui serangkaian kerja dan prosedur analisis yang direncanakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi manajemen mutu dalam meningkatkan kompetensi Pedagogik Guru di MTs Mathlaul Anwar Bojong.

1. Menjelaskan tentang bagaimana Implementasi manajemen mutu di MTs Matlaul Anwar Bojong
2. Mengungkapkan kompetensi pedagogik guru di MTs Mathlaul Anwar Bojong
3. Menemukan upaya-upaya peningkatkan kompetensi pedagoik Guru di MTs Mathlaul Anwar Bojong

F. Manfa'at Penelitian

1. Manfa'at teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah implementasi manajemen mutu dalam peningkatkan kompetensi pedagogik guru.

2. Manfa'at praktis

- a. Manfaat praktis, yakni sebagai bahan masukan bagi MTs Mathlaul Anwar Bojong untuk segera mengambil langkah-langkah strategis operasional dalam rangka lebih meningkatkan pengelolaan manajemen mutu pada sekolah sesuai dengan dinamika, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Manfaat Ilmiah, yakni sebagai sumbangsi pengetahuan bahwa manajemen mutu pendidikan dan tenaga kependidikan sangat penting artinya bagi setiap lembaga pendidikan. Karena itu, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran yang signifikan bagi kalangan MTs Mathlaul Anwar Bojong dan lembaga pendidikan lainnya untuk senantiasa mengimplementasikan manajemen mutu tersebut.

G. Hasil penelitian yang relevan

Peneliti Luk-luk Nur Mufidah berjudul *Aktualisasi TQM dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di lembaga Pendidikan Islam*, menjelaskan bahwa pendidikan yang berorientasi pada mutu (*Quality Oriented*), yang paling banyak berperan adalah pendidik (guru) dalam upaya menyiapkan peserta didik yang berkualitas dan bermutu dalam berbagai aspek, baik dalam aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan serta aspek perilaku, oleh karena itu menjadi guru profesional, hendaknya memiliki dua kategori, yaitu *capability* dan *loyalty* artinya guru harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik dan skill tentang mengajar yang baik, mulai dari perencanaan, implementasi sampai evaluasi dan memiliki loyalitas keguruan yakni loyal kepada tugas-tugas keguruan yang tidak semata-mata hanya di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah di kelas.²³ Dalam peneliti ini membahas tentang manajemen mutu dalam peningkatan profesionalisme guru, sedang peneliti membahas tentang manajemen mutu dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru.

Kalbi Jafar dalam penelitiannya di Madrasah Aliyah DDI Taqwa Pare-pare meneliti tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam pengembangan kompetensi profesional guru Madrasah Aliyah DDI takwa Pare-pare, dalam penelitiannya menemukan bahwa fungsi manajemen memiliki peran dalam proses pembinaan kompetensi profesional pendidik. Namun hal tersebut harus berada di bawah arahan kepala sekolah sebagai

²³ Luk-Luk Nur Mufidah, *Aktualisasi TQM dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 95-96.

upaya peningkatan kualitas pendidikan dan didukung dengan adanya keterlibatan pendidik.²⁴ Yang menjadi pembahasan dalam tesis Kilbi Jafar mengkhusus pada kompetensi profesional guru, sementara peneliti membahas kompetensi pedagogik guru. supaya peningkatan kualitas pendidikan dan didukung dengan adanya keterlibatan pendidik.²⁵ Yang menjadi pembahasan dalam tesis Kilbi Jafar mengkhusus pada kompetensi profesional guru, sementara peneliti membahas kompetensi pedagogik guru.

Sudirman dalam penelitiannya meneliti tentang *Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) pada Madrasah Aliyah Negeri Pangkep*. Secara sepintas, penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, walaupun lokasi penelitiannya berbeda. Namun bila dicermati masalah yang diteliti oleh Sudirman dalam skripsinya tersebut banyak perbedaan dengan skripsi peneliti. Pada intinya Sudirman meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi manajemen mutu terpadu pada MAN Pangkep dan upaya yang dilakukan kepala MAN Pangkep untuk meningkatkan kualitas yang baik.²⁶

Normawati dalam penelitiannya tentang manajemen mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Mode Palu menggambarkan tentang bagaimana mutu pendidikan sesuai dengan indikator standar nasional pendidikan dengan berdasarkan dari sisi sumber daya manusia, kurikulum, sarana dan prasarana

²⁴ Kalbi Jafar, *Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru* (Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 8.

²⁵ Kalbi Jafar, *Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru*, h. 9.

²⁶ Sudirman, *Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) pada Sekolah Aliyah Negeri Pangkep, Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana UMI, 2007), h. 53.

serta metode pengelolaan keuangan. Demikian juga dari sisi faktor pendukung dan penghambat penerapan indikator tersebut.²⁷ Dalam penelitian ini Normawati membahas bagaimana manajemen dalam meningkatkan kompetensi secara umum, sedang peneliti membahas tentang manajemen mutu dalam hubungannya dengan peningkatan kompetensi pedagogik guru.

Selain hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan disertasi yang disebutkan di atas, tentu masih ada lagi karya ilmiah lainnya berupa literature pokok yang obyek kajian dan penelitiannya memiliki hubungan dengan penelitian penulis dalam skripsi ini. skripsi atau karya ilmiah yang dimaksud, serta hasil penelitian sebelumnya yang telah disebutkan tadi banyak memberi ilustrasi kepada peneliti dalam meneliti tentang Implementasi manajemen mutu dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru di MTs Mathlaul Anwar Bojong.

H. Kerangka pemikiran

Peningkatan mutu pendidikan tampak mulai nyata walaupun belum dapat mengungguli negara-negara lain yang telah maju. Lahirnya berbagai Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang memberi penekanan akan pentingnya pendidikan, demikian seterusnya memasuki masa reformasi sampai sekarang, pemerintah telah berupaya keras memberikan perhatian spesifik terhadap dunia pendidikan sebagai indikator adanya landasan teoretis meningkatnya mutu pendidikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan, antara lain dapat dilihat dengan

²⁷ Normawati, *Manajemen Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Mode Palu)*, Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar, 2015). h. 163.

disahkannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.²⁸

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan mutu sebuah lembaga pendidikan sangat dipengaruhi bagaimana pelaksanaan manajemen mutu di sekolah tersebut. Namun demikian yang paling berperan dalam pelaksanaan manajemen mutu di suatu lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh kepala sekolah merupakan faktor yang memengaruhi kepemimpinannya. Disamping itu pendelegasian tanggungjawab supervisi kepadanya; kesadarannya terhadap fungsinya sebagai pemimpin pendidikan serta waktu yang dapat dipakai oleh kepala sekolah untuk menjalankan fungsi supervisi adalah merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kesempatan kepala sekolah untuk mengembangkan kepemimpinannya.²⁹

Selain kepala sekolah, komponen yang mempunyai peran penting di sebuah lembaga pendidikan adalah guru. Guru mempunyai peranan utama dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu di sebuah lembaga pendidikan harus memiliki guru-guru yang profesional sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 dinyatakan bahwa:

²⁸ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah, mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan dunia pendidikan di daerahnya masing-masing, kabupaten dan kota di seluruh propinsi Indonesia. Lihat Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000), h. 7.

²⁹ Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan* (Malang: Bina Aksara, 1982), h. 25.

Guru adalah pendidik profesional³⁰ dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.³¹

Berdasarkan hal tersebut guru memiliki fungsi, peran dan kedudukan yang harus diemban, sementara mereka dibatasi oleh tingkat kemampuan, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik tugas disebabkan kurangnya kompetensi yang mereka miliki. Agar pengembang mutu guru lebih bermakna, maka pengembang tersebut harus menyentuh keutuhan tugas pokok dan fungsi guru. Aspek-aspek yang harus dikembangkan tersebut antara lain: penguasaan kurikulum, penguasaan materi, penguasaan metode mengajar, penguasaan teknologi pembelajaran, penguasaan penilaian hasil belajar, serta kemampuan melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau wali kelas.

Upaya pengembangan profesi guru sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembaharuan LPTK yang mengarahkan pendidikan calon guru untuk penguasaan kompetensi tertentu, pembaharuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang kemudian diikuti dengan penerbitan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang salah satu isinya adalah tentang standar

³⁰ *Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Lihat redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 th. 2005) (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.*

³¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Guru dan Dosen*, h. 4.

tenaga kependidikan, sampai perkembangan terakhir dengan diterbitkannya UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, yang menjadi dasar pijakan utama pengembangan profesionalisasi guru.³²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa manajemen mutu di sebuah lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kompetensi berbagai komponen yang ada di dalamnya, termasuk peningkatan kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik sangatlah penting dalam meningkatkan mutu sebuah lembaga pendidikan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengikuti sistematika peneliti sesuai dengan aturan yang berlaku, maka secara sistematika peneliti membagi kedalam 5 (Lima) BAB dan subabnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II Pembahasan yang terdiri dari: Manajemen Mutu terdiri dari pengertian Pengertian Manajemen Mutu, Manajemen mutu pendidikan, perinsip-perinsip manajemen mutu, Manajemen Mutu Pendidik, yang kedua kompetensi pedagogik yang terdiri dari: pengertian kompetensi, pengertian pedagogik, kompetensi pedagogik, yang ketiga Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Manajemen Mutu yang terdiri dari: rekrutmen guru,

³² H.M. Sulthon Masyhud, *Manajemen Profesi Kependidikan* (Cet. I; Jember; Kurnia Kalam Semesta, 2014), h. 2-3.

pendidikan dan pelatihan, mentoring, supervisi, sertifikasi, yang ke empat karangka konseptual.

BAB III Metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengelolaan data, pengujian keabsahan data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan manajemen mutu pendidik di MTs Mathlaul Anwar Bojong, kompetensi pedagogik guru di Mts Mathlaul Anwar Bojong, Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru.

BAB V Penutup Meliputi: kesimpulan dan saran-saran.